

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aset

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan poin 60, aset adalah sumber daya ekonomi, yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar (SAP:62), aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi (SAP:63):

1. kas dan setara kas
2. investasi jangka pendek
3. piutang
4. persediaan

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum (SAP:64). Aset non lancar meliputi:

1. investasi jangka panjang
 - a. investasi non permanen
 - b. investasi permanen
2. aset tetap
3. dana cadangan
4. aset lainnya

2.1.1 Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan (PSAP No. 06). Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa

1. Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

2. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria (PSAP No 06:20)

1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat soial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung nomor 3 tahun 2008 tentang penyertaan modal pemerintah propinsi lampung pada bab II pasal 2 disebutkan bahwa maksud dan tujuan penyertaan modal Pemda adalah:

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perseroan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP No 07:5).

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah : biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya konstruksi.

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara kontinyu dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah diambil pada masa-masa yang lalu perlu dilihat dan dianalisis tentang hasil-hasilnya serta implikasinya pada masa sekarang.

Berbagai data statistik yang merupakan ukuran kuantitatif mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Kestabilan perekonomian yang diciptakan melalui kesejahteraan sosial, politik, dan sebagainya diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Angka-angka pendapatan regional juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan pemerintah dan swasta.

2.2.1 Definisi Pendapatan regional

Pengertian pendapatan regional atau sering disebut produk domestik regional bruto (PDRB) adalah seluruh nilai netto barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah pada waktu tertentu, atau dari segi arus uangnya adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Dengan kata lain PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu unit usaha dalam suatu daerah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dikurangi dengan biaya antara yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut.

PDRB dapat dihitung dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu : pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Secara konsep hasil penghitungan dari ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB Kota Bandar Lampung adalah pendekatan produksi.

2.2.2 Tujuan dan Kegunaan Statistik Pendapatan Regional

Statistik pendapatan regional merupakan indikator makro ekonomi yang disusun berdasarkan data statistik lintas sektoral, merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya. Selain dihitung berdasarkan harga konstan juga dihitung berdasarkan harga berlaku.

Pendapatan regional yang dihitung berdasarkan harga konstan dapat memberikan gambaran besarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara riil. Artinya pertumbuhan ekonomi tersebut belum terpengaruh oleh masa perubahan harga (inflasi) yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi. Selain itu, pendapatan regional atas harga konstan dapat pula digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi dengan daerah-daerah lain. Dengan membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor antar daerah akan dapat pula mengukur kemajuan yang telah dicapai oleh setiap daerah, sehingga dapat diketahui prioritas pelaksanaan pembangunan masing-masing daerah.

Pendapatan regional menurut harga berlaku akan memberikan gambaran besarnya kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah. Dengan mengetahui besarnya kontribusi masing-masing sektor akan dapat dijadikan dasar untuk menyusun prioritas kebijaksanaan pembangunan suatu daerah. Indikator yang sangat populer yang dapat diturunkan dari pendapatan regional atas harga berlaku adalah pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita merupakan rata-rata pendapatan yang

diterima oleh masing-masing penduduk, yang akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Todaro (2000:115) ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, modal atau sumber daya manusia. Investasi produktif bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang ekonomi dan sosial berupa pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi jalan, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi serta pembangunan fasilitas komunikasi.

Ekonomi nasional dan ekonomi daerah berhubungan secara timbal balik, ekonomi nasional merupakan penjumlahan dari ekonomi daerah sedangkan ekonomi daerah adalah pemecahan ekonomi nasional menjadi ekonomi-ekonomi daerah. Pemerintah daerah tidak akan membiarkan dinamika pertumbuhan ekonomi pasar terlalu bebas bekerja diwilayahnya. Pemerintah daerah akan terus bertindak secara aktif untuk meraih dan menarik dinamika pertumbuhan ekonomi dan modal ke wilayahnya dengan menyediakan infrastruktur yang lengkap.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam,

sumber daya manusia (human resources) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Todaro, 2000, 37).

Munnell, dengan fungsi produksi Cobb Douglas, mendukung dampak yang kuat dan signifikan dari infrastruktur publik pada pertumbuhan produktivitas di 48 negara bagian USA selama tahun 1970 – 1986. Variabel yang digunakan meliputi jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas air minum, gas, listrik dan infrastruktur non militer lainnya serta mesin – mesin. Kesimpulannya modal publik mempunyai dampak positif pada produktivitas output dengan elastisitas sebesar 0,15 sedangkan modal swasta 0,31 atau elastisitas modal publik setengah dari modal swasta (Munnell, 1990).

McGuire menunjukkan bahwa modal publik mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap produk bruto negara – negara di Amerika Serikat. Variabel jalan memberikan pengaruh yang paling besar sedangkan air dan saluran pembuangan memberikan dampak yang kecil sementara modal publik lainnya tidak signifikan secara statistik.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Abdul Halim:2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Menurut UU No 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. pajak hotel
2. pajak restoran
3. pajak hiburan
4. pajak reklame
5. pajak penerangan jalan
6. pajak pengambilan bahan galian golongan C
7. pajak parkir

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

Penerimaan ini meliputi :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP
4. Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil
5. Retribusi pelayanan pemakaman
6. Retribusi pelayanan pengabuan mayat
7. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
8. Retribusi pelayanan pasar
9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
10. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
11. Retribusi penggantian biaya cetak peta
12. Retribusi pengujian kapal perikanan
13. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
14. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
15. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
16. Retribusi jasa usaha terminal
17. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
18. Retribusi jasa usaha tempat penginapan / pesanggrahan / villa
19. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
20. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
21. Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal
22. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
23. Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air

24. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
25. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
26. Retribusi izin mendirikan bangunan
27. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
28. Retribusi izin gangguan
29. Retribusi izin trayek

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro

3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendaptan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik.

PAD idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002;

Bappenas 2003). Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat dari tahun 2000 ke tahun 2001 (Biro Pusat Statistik, 2002).

Upaya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan meratakan hasil hasil pembangunan.

Meningkatnya penerimaan PAD sebenarnya merupakan eksponen dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (pajak dan restribusi) yang akan diterima. Penerimaan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003) menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD.

2.4 Kerangka Pemikiran

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Dengan adanya investasi pemerintah diharapkan dapat memacu pembangunan di daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Atmaja (2001) menganalisis pengaruh investasi swasta, investasi sektor publik, dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di propinsi Bali menyimpulkan bahwa investasi swasta dan investasi

sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di propinsi Bali.

Giri (2000) mengadakan penelitian dengan judul "Peran Sektor Publik di Kabupaten Badung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Propinsi Bali". Sektor publik yang dimaksud adalah investasi pemerintah, [eluaran konsumsi pemerintah, dan pendapatan daerah. Hasil analisisnya menyimpulkan bahwa investasi pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional propinsi Bali.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun anggaran) yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penambahan aset tetap pemerintah diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Munnell, dengan fungsi Cobb Douglas mendukung dampak yang kuat dan signifikan dari infrastruktur publik pada pertumbuhan produktivitas di 48 negara bagian USA selama tahun 1970 – 1986. variabel yang digunakan meliputi jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas air minum, gas, listrik dan infrastruktur non militer lainnya serta mesin-mesin.

Kesimpulannya modal publik mempunyai dampak positif pada produktivitas output dengan elastisitas sebesar 0,15 sedangkan modal swasta 0,1 atau elastisitas modal publik setengah dari modal swasta (Munnell, 1990).

McGuire menunjukkan bahwa modal publik mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap produk bruto negara-negara di Amerika Serikat. Variabel jalan memberikan

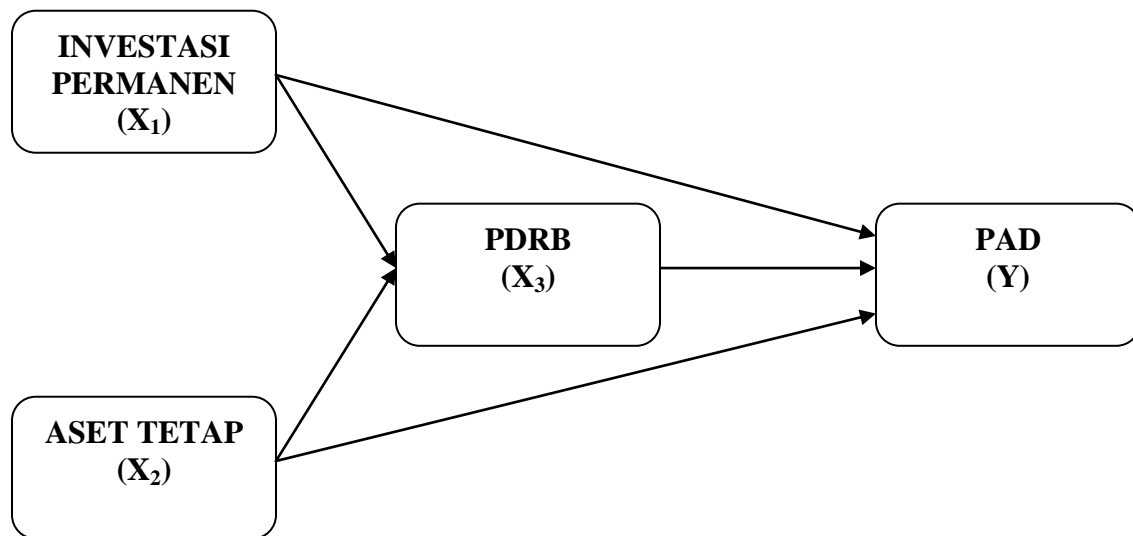
pengaruh yang paling besar sedangkan air dan saluran pembuangan memberikan dampak yang kecil sementara modal publik lainnya tidak signifikan secara statistik.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kemandirian daerah seharusnya dapat mendorong pemerintahan daerah untuk dapat lebih berwenang dalam mengelola keuangan daerah dan tentunya mempunyai dampak yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Tingkat kesejahteraan rakyat pada suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan indikator Produk domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi PDRB pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyat pada daerah itu, begitu juga sebaliknya jika PDRB pada suatu daerah rendah, maka tingkat kesejahteraan pada daerah itu akan rendah pula.

Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan eksese/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini (Sidik, 2002). Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima. Penerimaan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan PDRB.

Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003) menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD.

Kerangka pemikiran dalam penulisan tesis ini dapat digambarkan dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran

2.5 Pengembangan Hipotesis

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi pemerintah diharapkan akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah

H_1 : investasi permanen berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun anggaran) yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penambahan aset tetap pemerintah diharapkan akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah

H₂ : aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB

Investasi permanen diharapkan juga dapat meningkatkan PAD kota Bandar Lampung. Penyertaan modal pemerintah kota Bandar Lampung ke BUMD diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah

H₃ : investasi permanen berpengaruh secara signifikan terhadap PAD

Aset tetap diharapkan juga dapat meningkatkan penerimaan PAD. Dengan banyaknya aset tetap yang disediakan pemerintah kota Bandar Lampung diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai pendapatan dari pajak dan retribusi. Hipotesis yang diajukan adalah

H₄ : aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap PAD

Investasi permanen dan penambahan aset tetap diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Bandar Lampung. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan PAD kota Bandar Lampung. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah

H₅ : Investasi permanen dan aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap PAD melalui PDRB